



NOTA DINAS

Nomor : 1698/DJPPI.6/PI.05.05/08/2020

Kepada Yth : Kepala Pusat Informasi dan Humas
Dari : Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika
Hal : Publikasi Penyelenggara Telekomunikasi yang Telah Mendapat Surat Teguran Ketiga Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2018
Klarifikasi : Segera
Tanggal : 05 Agustus 2020

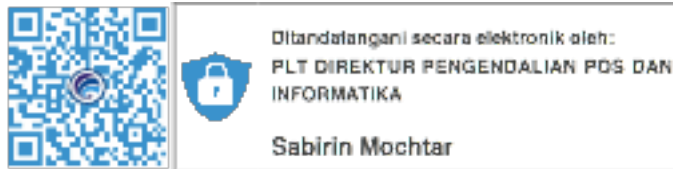
Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* menyatakan bahwa Penyelenggara Telekomunikasi yang telah membayar BHP Telekomunikasi wajib menyampaikan dokumen dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo pembayaran.
2. Merujuk Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 tahun 2020 tentang Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Layanan Pos Universal, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal dan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran, jatuh tempo pembayaran BHP Telekomunikasi khusus untuk tahun buku 2019 yang jatuh tempo pada 30 April 2020 dan belum dilakukan pembayaran, dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2020
3. Berdasarkan data penerimaan PNPB BHP Telekomunikasi dari 533 penyelenggara telekomunikasi, masih terdapat 34 penyelenggara yang belum melaksanakan penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019.

4. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat telah diterbitkan Surat Kasubdit Pencegahan dan Penertiban tanggal 2 Maret 2020 perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019, Surat Plt Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Nomor: B-996/DJPPI.6/PI.05.05/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal jatuh tempo pembayaran BHP Telekomunikasi tahun buku 2019, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 13 Juli 2020 perihal Surat Teguran Pertama Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Kewajiban BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019, Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tanggal 23 Juli 2020 perihal Surat Teguran Kedua Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019 dan Surat Plt. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika tertanggal 5 Agustus 2020 perihal Surat Teguran Ketiga Penyampaian Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung Terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019. mohon bantuan Saudara kiranya untuk dapat mempublikasikan para Penyelenggara Telekomunikasi yang belum melaksanakan kewajiban BHP Telekomunikasi tersebut pada *Website* Kementerian Kominfo (daftar perusahaan terlampir).
5. Adapun dokumen yang dimaksud, antara lain:
 - a. Laporan Keuangan (*unaudited*) serta Surat Pernyataan tidak diaudit (bermaterai)
 - b. Laporan auditor independen (*audited*)
 - c. *Chart of Account* (Daftar Akun)
 - d. *General Ledger* (buku besar) terkait pendapatan perusahaan
 - e. *Trial Balance* (neraca percobaan/neraca saldo) dan/atau *Working Profit and Loss* (WPL)
 - f. Bukti transfer pembayaran BHP Telekomunikasi
6. Dokumen dimaksud dapat disampaikan melalui Website : <https://ditdal.kominfo.go.id> dan apabila penyelenggara sudah melakukan penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019, mohon dapat melakukan klarifikasi ke **Ahmad Rifai (0878 8550 3106)** atau **Panji Wisnu (0878 8413 5993)** dan surat teguran ketiga penyampaian laporan keuangan dan dokumen pendukung terkait BHP Telekomunikasi tersebut dan publikasi ini dapat diabaikan
7. Dalam publikasi tersebut, mohon dapat ditambahkan informasi bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation*, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan Penyelenggara tersebut tidak memenuhi kewajiban dimaksud, maka akan dikenakan **sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi.**

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melampaikan Laporan Keuangan dan Dokumen Pendukung terkait BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS IZIN	KOTA
1	Adau Putra Network	ISP	Semarang, Jawa Tengah
2	Ajn Solusindo	Jartaptup dan NAP	Jakarta Pusat
3	Bayu Mitra Telekarsa	Jartaptup	Jakarta Pusat
4	Blambangan Cahaya Timur	ISP	Banyuwangi
5	Buana Intermedia Global	Premium Call	Jakarta Barat
6	Corbec Communication	Jartaplok PS	Jakarta Selatan
7	Dinamika Mediakom	ISP	Yogyakarta
8	Fajar Techno System	ISP	Makasar
9	Generasi Indonesia Digital	ISP	Jakarta Selatan
10	Global Teknologi Teraindo	ISP	Kota Depok
11	Gomeds Network	ISP	Gorontalo
12	Holima Cipta Indonesia	Premium Call	Jakarta Selatan
13	Jabar Telematika	ISP	Bandung, Jawa Barat
14	Jaya Komunikasi Indonesia	ISP	Jakarta Selatan
15	Kings Data Telecom	JARTAPLOK PS	Kota Bekasi
16	Kings Network Indonesia	ISP	Kota Bekasi
17	Lintas Jaringan Nusantara	ISP	Karawang, Jawa Barat
18	Matra Mandiri Prima	Jartaptup	Jakarta Selatan
19	Media Citra Makmur	Premium Call	Jakarta Barat
20	Mitra Internet Makmur	ISP	Surabaya
21	Nusantara Sarana Telekomunikasi	Jartaptup	Jakarta Selatan
22	Prestasi Piranti Informasi	ISP dan Jartaplok PS	Jakarta Pusat
23	Rahajasa Media Internet	ISP	Jakarta Selatan
24	Sahabat Prima Karya	ISP	Surabaya, Jawa Timur
25	Sarana Integrasi Prima	Jartaplok PS	Jakarta Selatan
26	Satata Neka Tama	ISP	Jakarta Selatan
27	Solusi Aksesindo Pratama	ISP	Jakarta Selatan
28	Sriwijaya Internet Services	ISP	Sumsel
29	Supernet Advance Teknologi	ISP	Jakarta Pusat
30	Telekomunikasi Pekanbaru Madani	Jartaptup	Pekanbaru
31	Telemedia Network Cakrawala	ISP	Medan, Sumatera Utara
32	Tigatra Infokom	ISP	Jakarta Pusat
33	Transdata Sejahtera	ISP dan Jartaplok PS	Banyumas
34	Wahana Telekomunikasi Dirgantara	Jartaptup	Jakarta Pusat